



DAFTAR SEGERA!
DAPATKAN DISKON KHUSUS

*Informasi dan Pendaftaran
<http://bit.ly/neutronyogyakarta>

 **0811 2946 623**



APLIKASI NEUTRON SISWA

FREE

- Tes Psikologi & Konseling
- Rasionalisasi Masuk PTN
- Metode Penalaran/Gambling
- TOEFL / English Skills
- Program IUP/IUP-UGM

Download on the
 

BIMBINGAN MULAI: **JUNI** **24 - 29**

SIAP LEBIH DINI
NAIK KELAS MASUK NEUTRON YOGYAKARTA
Langkah Pasti Meraih Prestasi

PERSIAPAN:
ASESMEN SUMATIF/SAS/SAT | UJIAN SEKOLAH/ASPD | SNBP | UTBK-SNBT | SELEKSI MANDIRI PTN | IUP/IUP-UGM

BIMBINGAN BELAKA:
4-5-6 SD | 1-2-3 SMP
1-2-3 SMA | GAP YEAR



www.neutron.co.id

BUKA HOTLINE WA 0855 5555 4141

Judi, Polri Ancam Pecat Personelnya

JAKARTA (KR) - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Syahardiantono menegaskan kembali komitmen Polri untuk menindak tegas anggotanya yang terlibat judi daring. Personel Polri diminta tidak terlibat ataupun melibatkan diri, baik sebagai pejudi maupun pelindung sindikat judi.

"Kami berpesan kepada jajaran, jangan coba-coba melibatkan diri dalam perjudian ini. Manakala didapatkan pasti ditindak tegas, ancamannya adalah PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat," tandasnya di Mabes Polri Jakarta, Jumat (21/6).

Polri, lanjutnya, bersepakat dengan masyarakat bahwa perjudian melanggar norma hukum dan agama, dan pemberantasannya memerlukan upaya terpadu. "Semua agama melarang perbuatan mudarat ini, sudah banyak korban," katanya.

Syahr mengatakan, Polri berkomitmen memberantas perjudian, baik secara daring maupun konvensional.

sional. Komitmen tersebut lewat penegakan hukum, baik bagi masyarakat umum maupun internal Polri. Dari sisi internal kepolisian, Propam Polri sudah menerbitkan surat telegram (STR) terkait upaya-upaya penegakan hukum terhadap anggota-anggota Polri yang melakukan pelanggaran diduga terlibat dalam kegiatan-kegiatan perjudian. "Arahannya sudah kami berikan kepada jajaran dan para Kabid Propam sudah menindaklanjuti untuk melakukan pengawasan secara berjenjang," ungkapnya.

Pengawasan ini, kata Syahr, akan berlanjut terus menerus seba-

gai bentuk komitmen Polri. "Pengawasan internal Polri meyakini bahwa seluruh anggota Polri di seluruh Polda dan jajaran semuanya tidak ada yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini, baik sebagai yang melakukan perjudian ataupun yang membekingi istilahnya, ataupun yang sengaja mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

Propam Polri membuka hotline pengaduan masyarakat bila menemukan anggota Polri yang terlibat perjudian dapat dilaporkan melalui layanan WhatsApp di nomor 0855 5555 4141. "Hotline ini 24 jam kami siapkan sehingga jangan ragu-ragu, seluruh masyarakat yang mengetahui terkait pelanggaran anggota silakan langsung WA di situ. Di situ ada aplikasinya, akan dituntun oleh petugas di situ," pungkasnya.

(Ant/Has)-f

AWASI KASUS PEMBUNUHAN VINA

Kompolnas Pastikan Turun Langsung

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung mengawasi pengusutan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky di Cirebon pada 2016. Kompolnas menjalankan fungsinya mengawasi kinerja Polri termasuk dalam pengusutan kasus pembunuhan tersebut sampai tahap persidangan.

"Untuk kasus Vina, saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan dan kemarin sudah turun. Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara dan rencananya 24 Juni nanti akan ada praperadilan," kata Menko Hadi saat jumpa pers di Kantor Kemenko

Polhukam RI Jakarta, Jumat (21/6).

Hadi juga menegaskan, Kompolnas serius menjalankan fungsinya untuk mengawasi kinerja Polri terhadap kasus yang saat ini menjadi perhatian publik itu. "Saya yakin ini Kompolnas, mereka memiliki integritas tinggi untuk menjaga Kepolisian," katanya.

Dalam struktur keanggotaan Kompolnas Periode 2020-2024, Menko Polhukam RI menjabat sebagai Ketua Kompolnas RI merangkap anggota, kemudian Menteri Dalam Negeri sebagai wakil ketua merangkap anggota, Menteri Hukum dan HAM RI mewakili unsur pemerintah sebagai anggota, dan Benny J. Mamoto sebagai Ketua Harian Kompolnas.

Terkait pengusutan kasus Vina,

Polda Jabar pada Kamis (20/6) menyerahkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eky ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Polda Jabar, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast di Bandung juga telah merampungkan berkas perkara tersangka utama atas nama Pegi Setiawan alias Perong untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Polda Jabar sejauh ini telah memeriksa sebanyak 68 saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon setelah hampir delapan tahun kasus tersebut belum tuntas terungkap. Puluhan saksi diminta keterangannya oleh penyidik dan mereka juga diminta mengikuti tes psikologi forensik.

(Ant/Has)-d

JANGAN SALAH PILIH SEKOLAH

Ketat, Seleksi PPDB SMA/SMK

YOGYA (KR) - Persaingan dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK diprediksi akan berlangsung ketat. Ketatnya persaingan tersebut perlu menjadi perhatian orangtua atau calon siswa baru dalam menentukan pilihan sekolah. Jangan sampai siswa yang memiliki nilai tinggi tidak bisa diterima di sekolah negeri karena tidak mempertimbangkan sebaran nilai.

"Persaingan dalam seleksi PPDB jenjang SMA/SMK tahun ajaran 2024/2025 diprediksi cukup ketat. Karena berdasarkan data yang ada di Disdikpora DIY, daya tampung sekolah negeri di DIY sebanyak 33.279 siswa, sementara calon siswa baru yang mengambil token sampai Jumat (21/6) sekitar 39.000 siswa. Dengan melihat data pengajuan token pendaftaran tersebut, banyak

pendaftar yang akan terlempar dari proses seleksi PPDB SMA/SMK Negeri," kata Kepala Disdikpora DIY Dr Didik Wardaya MPd, Jumat sore.

Didik mengungkapkan, kesuksesan PPDB dengan sistem zonasi tidak bisa dipisahkan fasilitas atau perangkat jaringan. Karena itu, sejumlah persiapan telah dilakukan Disdikpora DIY untuk mendukung kesuksesan PPDB sistem zonasi. Harapannya bisa meminimalisasi terjadinya gangguan teknis atau jaringan saat pelaksanaan PPDB.

"Sebetulnya seleksi PPDB dengan model zonasi ini bukan hal baru, tapi kami masih menemui ada beberapa orangtua yang kebingungan, termasuk saat pengambilan token. Kebanyakan dari calon siswa kesulitan untuk mendapatkan token karena data yang diunggah secara on-

line belum lengkap. Biasanya jika hal itu terjadi, mereka memilih datang ke Disdikpora DIY. Dampaknya, Posko Pengaduan (offline) yang semula akan ditutup pukul 12.00 WIB kami undur jadi pukul 15.00 WIB," papar Didik.

Didik mengungkapkan, secara umum proses aktivasi token cukup lancar. Kalaupun ditemukan kendala atau persoalan masih bisa diatasi di Posko Pengaduan di Disdikpora DIY. Kebanyakan calon siswa baru atau orangtua yang mengalami kesulitan karena masih ada yang belum memahami Juknis PPDB secara detail.

"Memang saat awal-awal kemarin sempat banyak orangtua yang kebingungan saat pengajuan token. Tapi setelah diberikan pendampingan dan penjelasan oleh petugas bisa diatasi," terangnya.

(Ria)-f

PENCEGAHAN TERORISME

BNPT Lakukan Monitoring di DIY

YOGYA (KR) - Memperkuat kolaborasi pencegahan terorisme di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) melakukan Focus Group Discussion (FGD) monitoring pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY. Kegiatan ini berlangsung dua hari dan berakhir, Jumat (21/6) di Hotel Grand Rohan Yogya di Jalan Raya Janti.

Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT Kolonel (Sus) Dr H Harianto MPd yang memimpin acara tersebut menyebutkan, kegiatan itu merupakan bagian dari program kerja Deputy Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Pada kesempatan itu, Harianto menampung banyak masukan dari peser-

ta FGD yang terdiri perwakilan perguruan tinggi, unsur TNI/Polri, Kemnag, Disdikpora, Binda, Densus 88 Antiteror, FKUB, Kesbangpol dan sejumlah lembaga lain.

Harianto memberikan apresiasi atas gagasan dan masukan yang muncul di FGD tersebut. Ia sepakat, pada intinya semua menghendaki penanggulangan dan pencegahan terorisme dilakukan sinergi dan kolaboratif. Lebih-lebih seperti disampaikan Densus 88 Antiteror di wilayah DIY masih ada narapidana terorisme (napiter) yang masuk dalam kategori merah.

Pihaknya juga mengatakan, FKPT yang dibentuk BNPT menjadi mitra strategis dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah. Pembentukan FKPT ini merupakan salah satu upaya BNPT dalam mencegah terorisme di seluruh Indo-

nesia dengan tujuan menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasis penerapan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing daerah.

Oleh karena itu, Harianto berharap, FKPT bisa diikutsertakan ketika ada sosialisasi maupun kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan terorisme.

Sementara itu, capaian kinerja FKPT DIY tahun anggaran 2023 meliputi lima bidang. Bidang Agama, Sosial dan Budaya berhasil melaksanakan camping keberagaman dan lomba pembuatan video. Kemudian Bidang Perempuan dan Anak menggelar sarasehan Perempuan Teladan, Optimis dan Produktif (TOP) cerdas digital dan Abadi (aku bangga menjadi anak Indonesia).

(Obi)-f

212 TAHUN HADEGING KADIPATEN PAKUALAMAN

Diwarnai Banyak Acara Melibatkan Masyarakat

YOGYA (KR) - Peringatan 212 tahun Hadeging Kadipaten Pakualaman diwarnai dengan berbagai acara yang melibatkan masyarakat luas.

"Tahun ini agak besar dan banyak acara. Kami ingin menunjukkan pada masyarakat Yogyakarta, bahwa Kadipaten Pakualaman milik keistimewaan Yogyakarta. Harapan kami acara itu bisa dinikmati masyarakat, karena bersifat umum," kata Penghageng Kawedanan Keprajan Puro Pakualaman, KPH Suryo Adinegoro.

Rangkaian kegiatan peringatan 212 tahun Hadeging Kadipaten Pakualaman sudah dimulai Mei 2024, diawali dengan selamat dan ziarah ke makam leluhur di Kotagede dan Girigondo Kulonprogo.

Kecuali itu, menyemarakkan acara peringatan berdirinya Kadipaten Pakualaman juga digelar berbagai kegiatan seperti grandprix lukis pelajar tingkat nasional, sayembara macapat, sayembara cipta cengkok macapat tingkat nasional, lomba cipta lagelag bocah tingkat nasional, lomba artikel ilmiah tingkat nasional, lomba jemparingan Mataraman, lomba dolanan anak, lomba karawitan daring tingkat nasional, bakti sosial, lomba literasi aksara Jawa tingkat nasional dan lomba tari klasik gagrak Pakualaman dan bazar UMKM.

Kadipaten Pakualaman, menurut KPH Suryo Adinegoro, saat ini sudah menggiatkan keistimewaan dengan berbagai macam kegiatan, misalnya setiap Sabtu Kliwon ada acara budaya berupa Upacara Ganti Dwaja Bregada Jaga Kadipaten Puro Pakualaman. Hal ini



KR-Wawan Isnawan

KPH Suryo Adinegoro

dimaksudkan agar warga masyarakat paham tentang keistimewaan.

"Kami juga aktif dalam kegiatan keistimewaan, karena visi misi kami adalah Kadipaten Pakualaman sebagai pengembangan kebudayaan," katanya.

Tapi di balik itu, lanjutnya, urusan pertanahan dan tata ruang tetap dilakukan, karena pertanahan dan tata ruang menjadi bagian dari urusan keistimewaan.

Terkait pembelajaran sejarah Kadipaten Pakualaman kepada generasi muda juga terus dilakukan dengan menggunakan teknologi modern. Begitu pula untuk perpustakaan. "Kami berusaha untuk menggunakan teknologi modern," katanya.

Kadipaten Pakualaman adalah pengembangan kebudayaan. "Harapan kami, Kadipaten Pakualaman memenuhi amanat leluhur kami yaitu kesejahteraan masyarakat," kata KPH Suryo Adinegoro.

Memperingati 212 tahun Hadeging Kadipaten Pakua-

laman, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY menyelenggarakan 'Sinau Sejarah Keistimewaan DIY', Sabtu (22/6) siang ini, pukul 13.00-16.00 di Kepatihan Pakualaman.

Acara yang didanai dengan dana keistimewaan (danais) ini ditayangkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Dalam acara Sinau Sejarah Keistimewaan bertema 'Peran Penting Kadipaten Pakualaman dalam Keistimewaan DIY' ini akan digelar pula dialog keistimewaan dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), KPH Suryo Adinegoro (Penghageng Kawedanan Keprajan Puro Pakualaman) dan Dr Sri Margana MHum (Sejarawan UGM) dengan moderator Wijil Rachmadani. Acara tersebut juga dimeriahkan siteran, tari serta penampilan kelompok musik. (Wan)

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Parpol Cenderung Kurang Optimal

SEMARANG (KR) - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Angraini mengungkapkan, keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai batas minimum 30 persen karena banyak faktor yang berkontribusi.

"Faktor yang paling dominan adalah komitmen partai politik (parpol) yang belum sepenuhnya melembaga dalam mendorong internalisasi keterwakilan perempuan di kelembagaan parpol," kata Titi Angraini menjawab pertanyaan dari Semarang, Jumat (21/6).

Pada Pemilu Anggota DPR 2024, kata Titi, masih belum menyentuh persentase itu atau sekitar 21,9 persen (127 kursi) dari 580 anggota DPR RI, meski ada kenaikan ketimbang pada Pemilu 2019 sekitar 20,5 persen (118 kursi) dari 575 anggota DPR RI.

Menurut Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI ini, partai masih musiman dalam mempersiapkan kader perempuan politik. Bahkan, cenderung kurang optimal dalam melakukan penguatan kapasitas dan pendidikan politik terhadap perempuan yang mereka calonkan pada pemilu.

"Kaderisasi dan rekrutmen politik belum didesain sebagai kerja kepartaian yang

berkesinambungan secara terus-menerus, baik saat siklus pemilu ataupun di luar siklus pemilu," ujarnya.

Pegiat pemilu ini mengemukakan, partai masih menempatkan keterwakilan perempuan sekadar memenuhi persyaratan formal pada pemilu atau belum sebagai paradigma yang melekat dalam tata kelola pemilu dan demokrasi yang inklusif.

"Jadinya, banyak yang justru beranggapan keterwakilan perempuan sebagai beban ketimbang sebagai prinsip yang niscaya dipenuhi dalam praktik berdemokrasi," katanya.

Belum lagi, lanjutnya, realitas mahalannya ongkos politik dan praktik politik transaksional yang sangat menghambat perempuan untuk bisa berkiper dalam kompetisi yang sehat dan adil dalam kontestasi pemilu.

Diakuinya, perempuan yang secara kapital memang tertinggal dibanding politikus laki-laki, akhirnya makin tertinggal dan sulit untuk menang pada kompetisi. Selain itu, masih adanya diskriminasi sikap patriarki di kalangan masyarakat pemilih yang menilai perempuan belum sepenuhnya layak menjadi pemimpin. Hal ini juga menghambat perempuan untuk bisa terpilih dan merebut kursi pada pemilu. (Ant)-d



KR-Istimewa

Peserta FGD BNPT-FKPT DIY foto bersama Kol (Sus) Harianto (no 4 dari kiri).